



**Terkait penambahan lagi sebesar Rp 351 miliar itu. Kami akan melihat perkembangan ke depan. Masih kami bahas juga sumber dananya**

**HASANUDDIN MASUD**  
Ketua Pansus percepatan penanganan dan penyebaran Covid-19

## Hasan Sebut Dana Covid-19 Bisa Tambah Rp 351 Miliar

### Realokasi Dana Tambahan untuk Juli-September

**SAMARINDA, TRIBUN** - Ketua Panitia Khusus (Pansus) percepatan penanganan dan penyebaran Covid-19 Hasanuddin Masud, menjelaskan tentang kemungkinan penambahan realokasi anggaran.

Sebelumnya, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim telah menyepakati, bahwa realokasi anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp 388,5 miliar untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19.

"Terkait penambahan lagi sebesar Rp 351 miliar itu. Kami akan melihat perkembangan ke depan. Masih kami bahas juga sumber dananya," kata Hasan, saat dijumpai wartawan, Selasa

(14/4). Hasan menegaskan, perkembangan situasi tentang Covid-19 akan dilihat tiga bulan ke depan. Politisi Partai Golkar tersebut berharap situasi telah mereda, sebelum tiga bulan.

"Mudah-mudahan ya sebelum tiga bulan, kalau lebih, akan kita bahas lagi penambahan anggarannya," kata Hasan. Yang jelas, lanjut Hasan, tugas pansus ialah memastikan Rp 388,5 miliar tersalurkan dengan tepat.

Menurut dia, dari Rp 388,5 miliar, akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, warga atau masyarakat terdampak dari segi ekonomi, dan jaring pengaman sosial. "Dari jumlah data yang ada, penerima

bantuan masih akan bertambah. Itu yang sedang pansus bahas," kata Hasan.

Seperti diberitakan, tugas pansus, melakukan monitoring dan memastikan realikasi anggaran. Usai rapat perdana digelar Senin (13/4) kemarin, pansus akan kembali menggelar rapat lanjutan pada Rabu (15/4).

Sebagai informasi, Pansus percepatan penanganan dan penyebaran Covid-19 berjumlah 15 orang, mewakili sembilan fraksi di DPRD Kaltim. Masa kerja pansus percepatan penanganan covid-19 satu bulan, sejak dibentuk pada Kamis (9/4) lalu. Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kerja legislatif. (m08)

## Tenaga Medis Belum Terpapar Corona

**SAMARINDA, TRIBUN** - Sekitar ratusan tenaga medis yang menangani pasien coronavirus disease atau covid-19 di Samarinda, dipastikan belum terpapar wabah corona. Sementara di beberapa daerah sudah ada yang terpapar virus tersebut.

Namun, untuk di Kota Samarinda belum ada satupun tenaga medis yang terjangkit wabah itu. Ini diungkapkan Pelaksana tugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda Ismed Kusasih, kepada Tribunkaltim.co, Senin (13/4).

Ismed menyebutkan, hampir seluruh tenaga medis yang ada di Nusantara sudah ada yang terpapar. Kata dia, berdasarkan statistik, tenaga medis yang terpapar di seluruh Indone-

sia sekitar di atas 5 persen.

Ia mencontohkan, seperti kasus tenaga medis di Jakarta. "Kalau di sana lebih dari 5 persen, misal yang kena positif 1000 pasien yang 100 orang itu dari tenaga kesehatan. Kalau di Samarinda belum," ungkapnya.

Ia menambahkan, karena Kota Samarinda belum menjadi epicentrum atau pusat penyebaran wabah seperti Jakarta. Hingga saat ini, belum ditemukan kasus atau pasien terpapar transmisi lokal.

Tetapi kalau sudah terjadi transmisi lokal lain lagi ceritanya. "Seperti Balikpapan kan sudah transmisi lokal. Artinya kemungkinan bisa terjangkit bukan terjadi karena hasil dari perjalanan, semua orang beresiko terhadap

penyakit covid-19," ucapnya.

Karena belum terjadi transmisi lokal, makanya Pemkot Samarinda berusaha mencegah. Namun bukan berarti tidak terjadi transmisi lokal. Tetapi, diupayakan dengan mendelay (menunda) bagaimana Samarinda tidak terjadi transmisi lokal.

"Apalagi Kota Samarinda ini berada di tengah-tengah transmisi lokal. Yakni Balikpapan, Makassar, Surabaya, bahkan Banjarmasin dan Pontianak juga," tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS dan Dinkes Samarinda, jumlah total tenaga medis dari semua kecamatan yang ada di Kota Samarinda sebanyak 632 orang. Untuk jumlah tenaga keperawatan tercatat 2168 tenaga. (m14)

# Makmur Usul Pembangunan Jalan Tidak Dihentikan

## ► Permudah Jalur Distribusi Perekonomian Daerah Pasca Pandemi Corona

**SAMARINDA, TRIBUN** - Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur HAPK berharap situasi pandemi Covid-19 segera pulih. Ia menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tetapi ia mengusulkan program pembangunan jalan seperti perawatan dan perbaikan berharap bisa tetap berjalan.

Wabah Covid-19 memberikan dampak luas, bukan hanya Kaltim. Tetapi, seluruh dunia merasakan dampak Covid-19, baik dari segi kesehatan, juga segi perekonomian. Makmur mengatakan, perlu diperhatikan pasca pandemi corona. Pasalnya, saat ini pemerintah fokus menanggulangi dan mengobati pasien corona.

Kebijakan yang diambil pemerintah pusat, mengutamakan keselamatan rakyat, dari segi kesehatan dan kebutuhan pangan.

Menurut dia, pasca pandemi tidak menutup kemungkinan memulai kembali aktivitas roda perekonomian. "Untuk menunjang itu, akses jalan sebagai jakur distribusi perekonomian antar daerah," ucap Makmur, saat dijumpai wartawan, Selasa (14/4).

Makmur optimis, terkait apa yang telah ia usulkan ke DPR RI beberapa waktu lalu mendapat respons. "Ya mudah segera ada tindakan. Saya yakin, ada tanggapan," kata Makmur. Mantan Bupati Berau dua periode ini, mengusulkan sejumlah hal. Diantaranya ialah tentang persentase alokasi anggaran.

Di mana anggaran bidang kesehatan disetarakan dengan bidang pendidikan. Sama-sama 20 persen, regulasi yang berlaku alokasi bidang kesehatan 10 persen. Usulan tersebut, kata Makmur, belajar dari pengalaman saat ini. Secara persentase, alokasi anggaran sekarang mayoritas untuk bidang kesehatan.

Usulan lain ialah, prioritas pembangunan jalan di Kaltim harus terus berlanjut.



**MAKMUR**

Jika program pembangunan jalan tidak diakomodir, maka akses perekonomian daerah bisa terganggu. "Secara infrastruktur, Kalimantan, khususnya Kaltim, masih banyak butuh pembangunan jalan," kata Makmur.

Jalan, kata Makmur, dibutuhkan untuk jalur distribusi yang mempengaruhi perekonomian. Ketiga, Makmur meminta agar adanya penambahan jumlah tenaga medis.

Sebab, DPRD Kaltim menerima sejumlah laporan terkait kurangnya tenaga medis, terutama di Kaltim yang memiliki wilayah yang luas.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri mendukung usulan Ketua DPRD Kaltim. Kata dia, infrastruktur menjadi sarana penting untuk membangkitkan ekonomi daerah.

"Bagaimana jika jalan atau jalur lintas antar kabupaten/kota rusak. Maka pasti ada pelambatan distribusi. Sementara, situasi nanti pasca pandemi perlu kecepatan dalam hal pendistribusian perekonomian," tambah Zuhri, politisi dari Partai Nasdem Kaltim. (m08/bud)

## Proyek Infrastruktur Dieliminasi

**DOSEN** Fakultas Hukum Universitas Mula-warman, Samarinda, Provinsi Kaltim, menilai situasi melawan coronavirus disease atau covid-19 semestinya proyek infrastruktur dieliminasi sementara. Karena, sejak awal, publik menginginkan agar politik anggaran diarahkan sepenuhnya untuk upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Pos anggaran dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, mestinya dieliminasi dan dialihkan ke penanganan Covid-19," kata Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, Selasa (14/4).

Pilihan kebijakan memangkas anggaran minimal 50 persen ini, lanjut dia, sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 itu diterbitkan.

Menurut dia, ini menandakan pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD bersama Guber-

nur sebagai Kepala Daerah, sangat minim inisiatif, lambat, dan miskin keberpihakan.

"DPRD dan Gubernur harus mampu mengambil inisiatif dalam mengambil kebijakan anggaran yang memihak dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 ini. Jangan selalu berposisi "wait and see" dan berpatakan kepada daerah lain dan pemerintah pusat," kritik Castro. Mungkin saja, Castro menduga, karena minimnya alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, ada yang takut dan khawatir kehilangan proyek?

"Jika benar demikian, berarti mereka benar-benar sudah kehilangan nalar dan akal sehat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya kepentingan rakyat yang paling utama di atas segalanya," sindirinya.

Jika semua anggota DPRD dan pejabat di Pemprov punya pikiran yang sama, Castro yakin, tidak sulit untuk merasionalisasi anggaran hingga 50 persen. (bud)



**MESRA**

*#workfromhome*

**DELUXE IDR 599 NETT/NIGHT**

Packages included:  
Breakfast for 2 Person, Fitness Center,  
Alamanda Swimming Pool

Jl. Pahlawan No.1  
Telp. +62 541 732772  
Fax. +62 541 741017  
www.mesra.com  
hotelmesra@mesra.com  
SAMARINDA - INDONESIA

Special price for Long Stay is available\*

**Marketing Official:**  
**0811 553 2772**

f @mesrahotel | @hotelmesra



**SERAHKAN BANTUAN** - Perwakilan CKB Grup Samarinda menyerahkan bantuan kepada Puskesmas Harapan Baru, Samarinda berupa APD, alat semprot beserta disinfektan, masker dan hand sanitizer.

## CKB Bantu APD untuk Tenaga Medis di Samarinda

**SAMARINDA, TRIBUN** - Perusahaan energi terintegrasi PT ABM Investama Tbk (ABM) melalui sejumlah anak usahanya menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD), multivitamin untuk tenaga medis, serta melakukan sosialisasi Covid-19 di daerah. Diantaranya melalui PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) dan PT Sanggar Sarana Baja (SSB), mendistribusikan bantuannya untuk tenaga medis di Balikpapan dan Samarinda.

Inisiatif bersama tersebut dilakukan untuk mendo-

kung peran pemerintah menanggulangi wabah Covid-19 atau virus Corona di Indonesia, khususnya daerah. CKB Group merupakan anak usaha ABM telah menyerahkan bantuan APD ke Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Surabaya.

Di Puskesmas Harapan Baru, Samarinda, CKB Group menyerahkan bantuan APD, berupa alat semprot beserta disinfektan, masker medis, masker kain, pelindung rambut, sarung tangan lateks dan hand sanitizer.

CKB Group juga berencana

mendistribusikan bantuan APD ke Puskesmas Gambut, Banjarmasin dan Puskesmas Manggar Baru, Balikpapan. "Tenaga medis merupakan garda terdepan kita dalam melawan Covid-19, tentu mereka butuh dukungan alat perlindungan diri terbaik yang memadai," ujar Iman Sjafie, Direktur Utama CKB Group.

Ke depannya, CKB juga tengah berancang-ancang untuk menyalurkan beberapa wilayah operasi strategis lainnya, serta mempersiapkan skema defensif penguatan internal.

Hal ini dalam rangka mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah ditetapkan Pemerintah.

"Selain karyawan tetap, kami juga memiliki banyak tenaga harian yang terdampak langsung atas kebijakan Work From Home (WFH) saat ini. Paket bantuan akan disalurkan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus," tambah Iman. (m07/son)